



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan fiskal di Provinsi Riau. Meskipun PAD dan Belanja Modal secara nominal terus meningkat, tingkat kemandirian fiskal daerah masih di bawah 30% dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi. Kondisi ini mencerminkan potensi konflik keagenan (*agency theory*), di mana pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal dalam pengelolaan keuangan publik. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (DJP K Kemenkeu) pada 12 kabupaten/kota di Riau selama 4 tahun, sehingga total sampel sebanyak 48 unit analisis. Metode analisis yang dipakai adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan diukur melalui tiga rasio: rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio aktivitas.

Berdasarkan hasil pembahasan untuk uji hipotesis, maka peneliti menyimpulkan sebuah kesimpulan sebagai berikut :

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar $3,995 > 0,05$ serta signifikansi (*p-value*) sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk periode 2021 hingga 2024.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Variabel Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 1,938 dengan nilai signifikansi $0,059 > 0,05$, maka belanja modal secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk periode yang sama 2021 hingga 2024.
- c. Uji simultan hipotesis variabel menunjukkan hasil nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan F hitung $(16,141) > F$ tabel $(3,20)$. Sehingga kesimpulan untuk uji simultan dimana pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2021 hingga 2024.

Temuan dalam penelitian ini mendukung pandangan dari *agency theory* yang menegaskan bahwa pemerintah daerah selaku agen mempunyai tanggung jawab untuk memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta mengalokasikan anggaran secara produktif melalui belanja modal. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja keuangan yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan publik yang bertindak sebagai prinsipal.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau

- a. Mengingat masih banyaknya daerah di Provinsi Riau yang mengalami pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) negatif atau fluktuatif, pemerintah kabupaten/kota perlu mengambil langkah strategis



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terintegrasi. Pemerintah disarankan untuk memaksimalkan PAD melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, menggali sumber pendapatan baru dari sektor unggulan serta BUMD, dan melakukan diversifikasi pendapatan khususnya bagi daerah yang bergantung pada sektor migas.

- b. Belanja modal harus diprioritaskan pada infrastruktur aset tetap yang berdampak jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, ruang publik dan konektivitas. Perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari pemborosan.
- c. Dalam Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, pada daerah dengan KKPD rendah perlu mengevaluasi komponen rasio efisiensi, kemandirian, dan aktivitas. Kapasitas aparatur pengelola keuangan perlu ditingkatkan melalui pelatihan agar pengelolaan anggaran lebih profesional dan berorientasi hasil.

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya.

- a. Dalam pengembangan model disarankan menambah variabel lain seperti pendapatan transfer dana pusat, belanja pegawai, dana transfer daerah, belanja barang dan jasa, pembiayaan daerah dan lainnya sehingga dapat terlihat jelas analisis yang lebih komprehensif.
- b. Dalam indikator kinerja keuangan daerah disarankan untuk mengembangkan rasio lain seperti rasio efektivitas dan rasio lainnya.